



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: DPR Minta KPK Usut Proyek Vaksin Flu Burung
Tanggal	: Minggu, 10 Juni 2012
Surat Kabar	: Koran Tempo
Halaman	: A3

DPR Minta KPK Usut Proyek Vaksin Flu Burung

JAKARTA — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendorong segera ditindaklanjutinya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan soal kasus vaksin flu burung mulai pekan depan. "Pasti akan kami *follow-up* minggu depan," ujar anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pituloka, ketika dihubungi kemarin.

Pernyataan ini menanggapi temuan BPK iihwal adanya kerja sama tidak sehat sejumlah pihak dalam pengadaan fasilitas vaksin flu burung antara Kementerian Kesehatan, perusahaan swasta, dan seorang politikus DPR berinisial MNZ, sebuah BUMN PT BF, serta sebuah universitas negeri di Jawa Timur.

BPK menemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 349,5 miliar dan potensi kerugian keuangan negara Rp 343,7 miliar. Dengan demikian, total kerugian mencapai Rp 693,2 miliar dari total anggaran sebesar Rp 1,3 triliun.

Wakil ketua komisi yang menangani masalah kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan itu, Irgan Chairul Mahfiz, berharap temuan ini bisa jadi pintu masuk untuk mengusut proyek vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan sampai tuntas. Hal ini juga menjadi pelajaran oleh komisi agar lebih teliti dalam mengegolkkan anggaran proyek.

Anggota Komisi IX dari Partai Amanat Nasional, Hang Ali, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung menindaklanjuti temuan BPK tersebut. "Kita tidak mau tumpang-tindih."

Meskipun demikian, Komisi juga akan mengawasi tindak lanjut kedua lembaga penegak hukum ini. "Idealnya, maksimal mereka menindaklanjuti sebulan dari sekarang. Kalau tidak, baru panti kerja bisa dibentuk," katanya.

Adapun pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai penyimpangan pengadaan sarana dan prasarana produksi vaksin flu burung akan berimbas lambatnya penanganan virus H5N1 tersebut. "Pihak yang dirugikan pastinya masyarakat," ucapnya.

Dosen Universitas Indonesia ini menilai pemerintah harus segera menangani kasus ini, baik yang berupa administratif maupun pidana. Bila menimbulkan kerugian, masyarakat bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena pemerintah mengabaikan hak warganya.

● M. ANDI PERDANA | SUNDARI | BERNADETTE CHRISTINA |
RR ARIYANI